

**PERAN PEMIMPIN ADAT TERHADAP
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DESA
(STUDI KASUS DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN,KECAMATAN
MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM, BALI)**

Oleh: Muhammad Kamil*; Emy Kholifah**

***Alumni FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember**

**** Staf Pengajar FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember**

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat yaitu untuk mengetahui kontribusi peranan pemimpin adat terhadap proses perumusan kebijakan di desa. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literature. Adapun teknik analisa data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif non parametrik dan teknik analisa kualitatif dengan interpretasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diketahui bahwa pada umumnya peran pemimpin adat melaksanakan berperan sebagai artikulator kepentingan bagi masyarakat, sebagai komunikator, dan sebagai motivator bagi masyarakat. Peran pemimpin adat juga berperan sebagai pihak yang mempengaruhi keputusan dalam proses perencanaan kebijakan, perumusan masalah, hingga ke tahap formulasi dan adopsi kebijakan dalam pemerintah desa. Dalam implementasi dualisme pemerintahan tersebut peranan pemimpin adat terhadap proses perumusan kebijakan di desa adalah 0.539 yang berarti sangat kuat dan sangat berpengaruh.

Kata Kunci: Peran Pemimpin Adat; Proses Perumusan Kebijakan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan wadah masyarakat untuk melangsungkan hidup, dalam setiap desa tentu ada instansi pemerintahan ataupun organisasi yang mempunyai pemimpin. Di Negara Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis suku dan dengan aneka ragam adat istiadatnya yang berbeda satu sama lain. Di masing-masing suku tersebut pastilah terdapat pemimpin yang di patuhi, di taati karena pemimpin tersebut dianggap mampu membina dan memberi kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang seperti itulah yang dijadikan oleh masyarakat sebagai pemimpin secara adat dan keberadaannya selalu di hargai dan di hormati. Seperti halnya di Desa Adat Tenganan Pegringsing yang menerapkan praktek dualisme kepemimpinan yakni pemimpin secara formal dan pemimpin informal. Tugas dan kewenangan masing-masing sangat jelas dan telah di pahami oleh masyarakat tenganan bahkan oleh masyarakat di Desa lainnya. Untuk mengkaji fenomena praktek dualisme kepemimpinan terutama dalam proses politik yang dilakukan oleh para pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan maka dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem yang dikembangkan oleh David Easton (dengan Struktur Tuntutan – Proses Politik – Kebijakan) sebagai acuan dalam menghasilkan pembahasan yang diinginkan.

METODOLOGI PENELITIAN

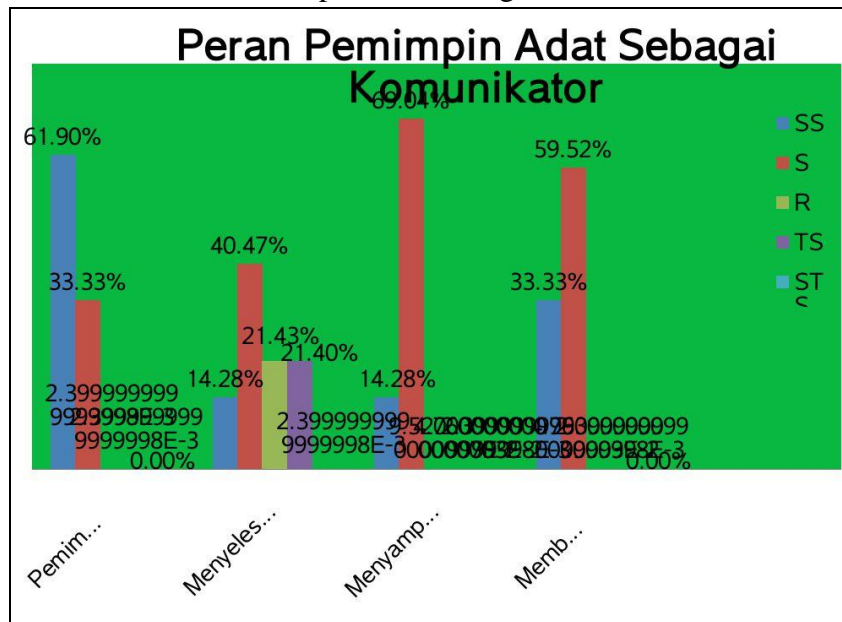
Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Tenganan Kecamatan Manggis kabupaten Karangasem Bali. Lokasi penelitian dipilih karena di Desa Adat Tenganan mempunyai dua Pemerintahan yaitu Pemerintahan Desa Adat dan Perbekelan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui peran pemimpin adat dalam pelaksanaan pemerintahan terutama dalam proses perumusan kebijakan di desa. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif kuantitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket. Adapun teknik analisa data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif non – parametrik dan analisa data kualitatif dengan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemimpin adat sangat kuat dalam proses pelaksanaan pemerintahan di desa terutama dalam proses perumusan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemimpin Adat Sebagai Artikulator Kepentingan Masyarakat

Artikulasi kepentingan merupakan suatu proses penginputan dari berbagai kebutuhan, tuntutan ataupun kepentingan masyarakat ataupun kelompok. Tuntutan dan kebutuhan kelompok dapat terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu, peran tokoh adat (Pemimpin Informal) sangat dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan di desa tenganan.

B. Peran Pemimpin Adat Sebagai Komunikator dalam Menyelesaikan Permasalahan
Peran Pemimpin Adat Sebagai Komunikator

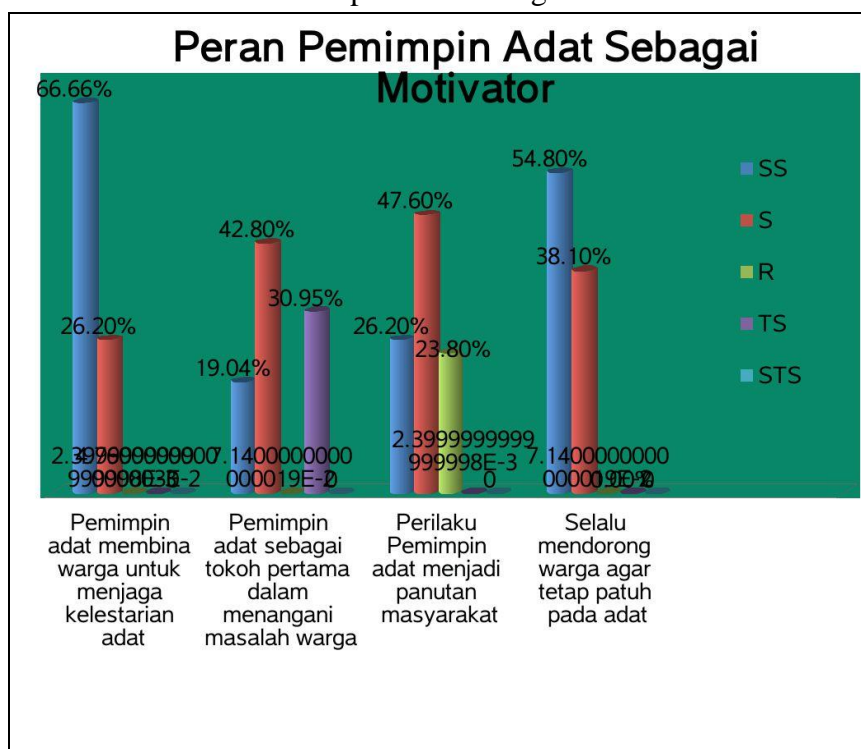


Sumber : Kuesioner no 5- 8 pada indikator kedua Variable X.

Pada grafik diatas 95% dari total keseluruhan responden mengakui bahwa pemimpin adat perannya sangat tinggi dan kuat terutama dalam penyelesaian konflik di desa. Seperti hak waris yang berlaku di desa tenganan adalah hak kesetaraan gender yaitu hak antara laki-laki dan perempuan adalah sama. 83.33% dari 42 responden mengatakan bahwa Pemimpin Adat selalu memperhatikan masyarakat dengan cara selalu memantau warga melalui komunikasi secara verbal maupun nonverbal.

Namun terdapat sedikit pendapat yang menyatakan berbanding terbalik dengan yang lain, sejumlah 16.67% yang berasal dari warga pande yang notabene adalah masyarakat yang pernah dikecewakan oleh pemimpin adat dan beberapa pejabat pemerintah desa karena faktor tertentu.

C. Peran Pemimpin Adat Sebagai Motivator dalam menjaga Kelestarian Adat
 Peran Pemimpin Adat Sebagai Motivator

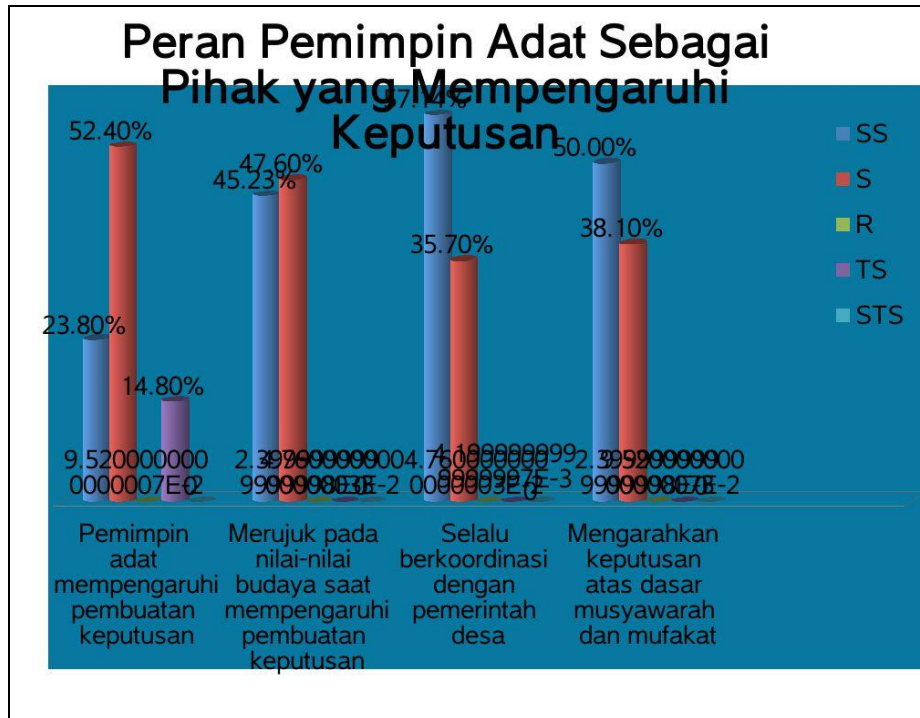


Sumber: Kuesioner no 9- 12 pada indikator ketiga Variable X.

Setiap individu berbeda dengan individu yang lainnya, tidak hanya dalam kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu dan bertindak, akan tetapi juga berbeda dalam keinginan atau memotivasi masyarakat. Peran motivator yang dilakukan oleh seorang pemimpin perlu diasah dan diperkuat sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Dalam menjalankan fungsinya sudah menjadi kewajiban para Krama Desa untuk membina warganya agar selalu patuh dan taat terhadap awig-awig (aturan desa adat). 93.68% dari total responden mengakui peran pemimpin adat baik dalam menjaga kelestarian desa ataupun dalam menjalankan aktivitas setiap harinya diyakini oleh masyarakat bahwa

hal tersebut merupakan pembinaan secara tidak langsung sehingga peran tersebut dianggap sangat penting dan menjadi motivasi bagi masyarakat. Karena pemimpin dan masyarakat meyakini bahwa pemimpin adat di desa tenganan merupakan tauladan yang patut di contoh oleh masyarakat sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin adat jarang ditemui di desa tenganan sesuai dengan pernyataan masyarakat dari hasil penelitian 73,8% menyetujui pertanyaan bahwa perilaku pemimpin adat adalah tauladan bagi warga di desa tenganan karena pemimpin adat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya harus sesuai dengan *awig-awig*.

D. Sebagai Pihak yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan
Peran pemimpin adat sebagai pihak yang mempengaruhi keputusan



Sumber: Kuesioner no 13- 16 pada indikator keempat Variable X.

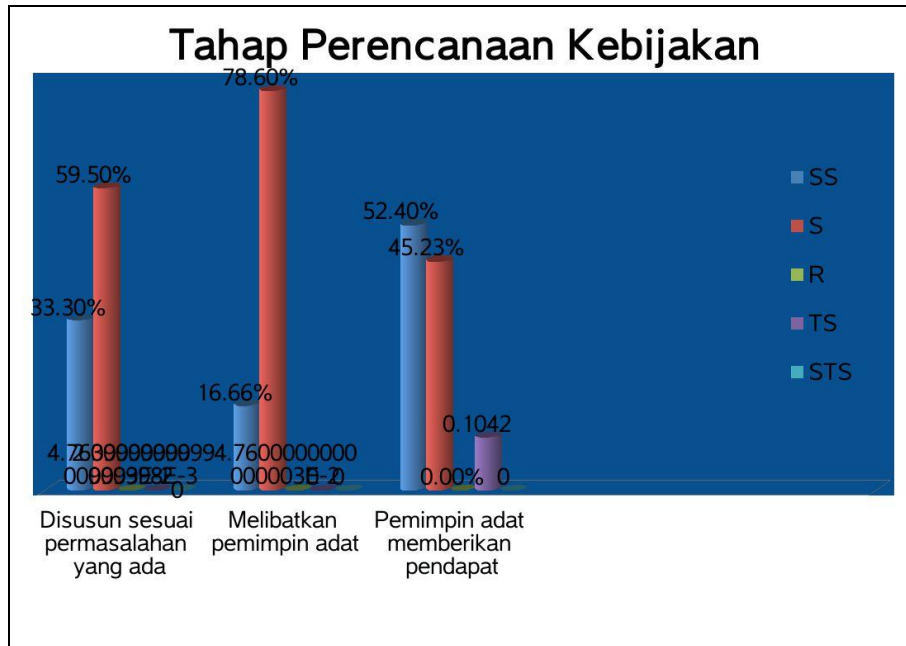
Pengambilan keputusan merupakan proses mental seorang pemimpin dalam masyarakat dan dalam tinjauan perilaku merupakan cerminan dari karakter seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya di nilai dari konsekwensi yang ditimbulkan melainkan melalui dari berbagai pertimbangan dalam proses. Hasil penelitian grafik di atas pada prosentase 75.12% dan 95.9% menunjukkan bahwa peran pemimpin adat dalam mempengaruhi pembuatan keputusan dalam proses perencanaan kebijakan ataupun dalam proses formulasi dan adopsi kebijakan di tingkat desa sangat tinggi, karena dalam pemikiran tokoh adat semua kebijakan yang dirumuskan harus merujuk kepada nilai-nilai budaya. Hasil survei membenarkan hal tersebut yaitu didukung oleh jumlah prosentase 92.21%

bahwa selalu ada koordinasi antara pemimpin adat dan pemimpin informal. 88.1% juga menunjukkan keputusan dalam koordinasi tersebut didasarkan atas musyawarah dan mufakat.

E. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal untuk menentukan tujuan sebelum dilaksanakannya perumusan masalah yang pada akhirnya akan menghasilkan output yang berupa keputusan atau kebijakan. Perencanaan perumusan kebijakan di desa tanganan di susun sesuai kondisi riil yaitu atas dasar permasalahan dan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Proses perencanaan perumusan kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa, pemimpin adat dan tokoh masyarakat.

Proses perencanaan kebijakan



Sumber: Kuesioner no 16- 18 pada indikator kedua Variable Y.

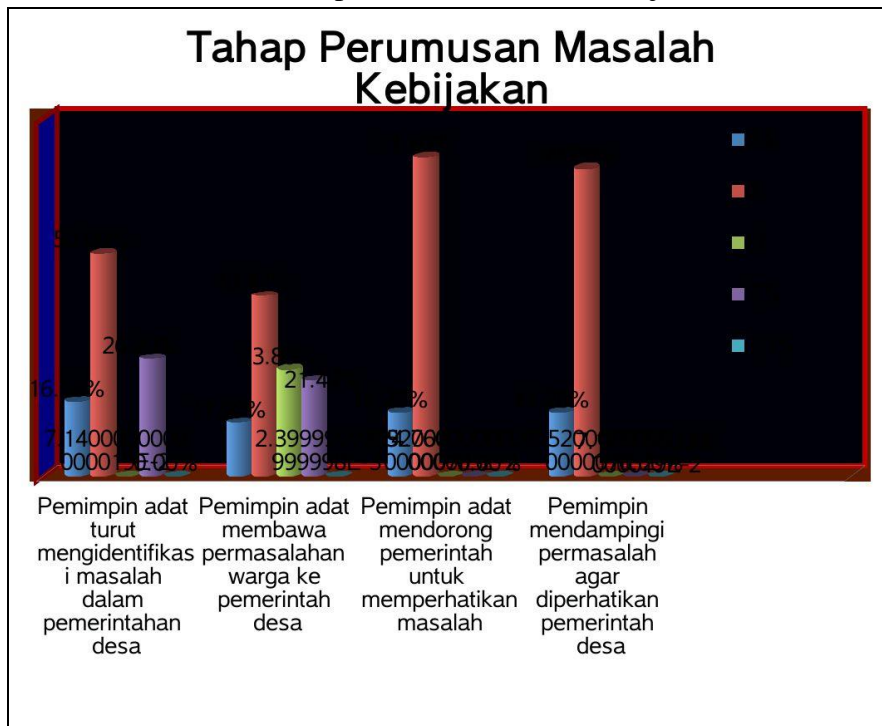
Prosentase 97.5% pada grafik di atas menunjukkan bahwa masyarakat merasakan bahwa dalam perencanaan tersebut pasti atas campur tangan pemimpin adat yang secara tidak langsung adalah mempertahankan kebudayaan adat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan hasil penelitian pada 94.72% masyarakat tahu jika proses perencanaan melibatkan semua aparatur pemerintah, pemimpin adat dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam proses perencanaan yang disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan permasalahan yang ada dan sudah teridentifikasi, yang pada akhirnya disusun secara bersama-sama agar menghasilkan sebuah keputusan untuk di masukkan ke dalam agenda kebijakan.

92.8% menjawab setuju bahwa dalam proses perencanaan kebijakan disusun atas dasar keadaan riil masyarakat yaitu sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada.

F. Tahap Perumusan Masalah

Merumuskan suatu masalah adalah langkah yang paling fundamental dalam merumuskan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah masyarakat harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

Proses perumusan masalah kebijakan

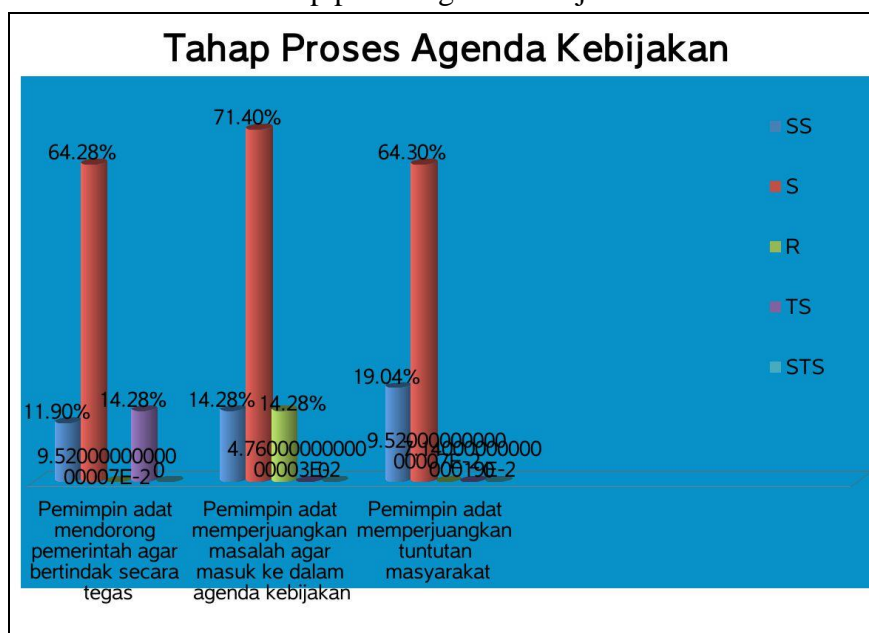


Sumber: Kuesioner no 19- 22 pada indikator kedua variable Y.

Dari hasil penelitian 66.6 % Pemimpin adat juga turut mengidentifikasi masalah yang ada dalam pemerintahan desa, karena sesuai fungsinya sebagai seorang krama desa harus mengetahui seluk beluk permasalahan di desa. Namun 32.16% Ragu-ragu dan tidak setuju, alasannya menurut masyarakat tidak semua permasalahan yang ada di perbekel desa teridentifikasi oleh pemimpin adat, jika permasalahan yang ada di kantor desa di bawa dalam pertemuan bulanan yang di selenggarakan oleh perbekel maka disitulah pemimpin adat dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan perbekel. Sesuai dengan pernyataan di atas, 51.56% menyatakan

setuju bahwa pemimpin adat selalu membawa permasalahan ke pemerintah desa, 44.50% ragu-ragu karena menurut mereka permasalahan yang ada dibawa keperintah desa apabila permasalahannya berkaitan dengan hukum nasional dan undang-undang, sedangkan permasalahan yang hubungannya dengan budaya desa tetangan masyarakat tetap menyelesaikannya dengan hukum adat. Selain itu bentuk dan wujud dari kepedulian adat terhadap desa adalah selalu mendorong pemerintah desa untuk memperhatikan masalah yang ada di desa tetangan, 83.32% mengatakan setuju bahwa kepedulian pemimpin informal (Adat) sangat tinggi kontribusinya.

G. Tahap Agenda Kebijakan
Tahap proses agenda kebijakan

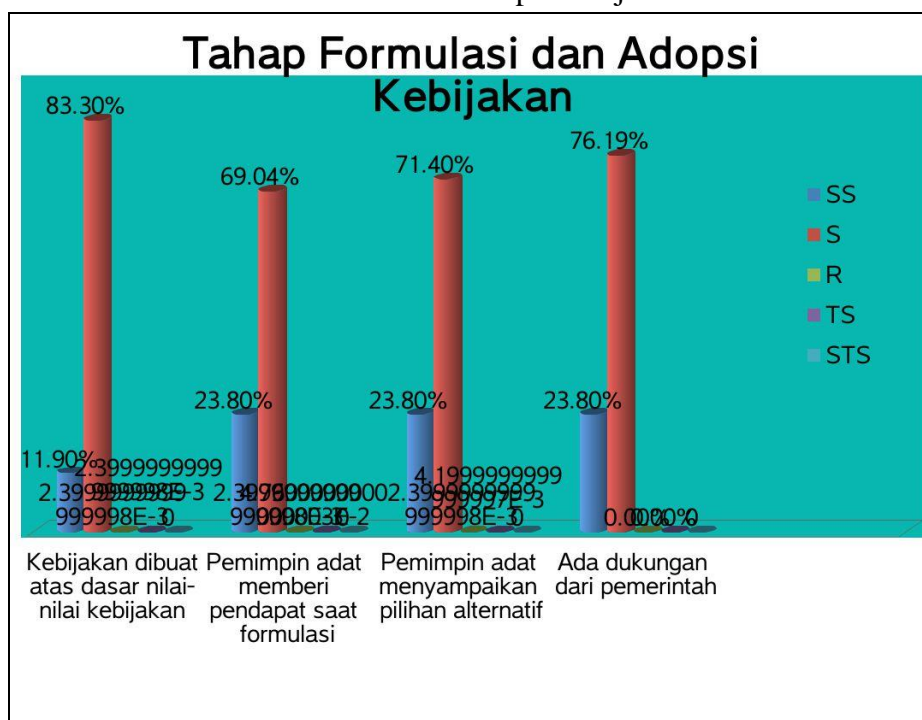


Sumber: Kuesioner no 26- 28 pada indikator ketiga Variable Y.

Tidak semua masalah yang ada di masyarakat masuk kedalam agenda kebijakan. Namun hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan. Dalam menjalankan fungsi artikulasi kepentingan masyarakat termasuk salah satunya adalah mengupayakan segala permasalahan dan tuntutan warga untuk selalu masuk ke dalam agenda kebijakan untuk menjadi bahan pembahasan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terbina. 83% responden memang mengakui bahwa pemimpin adat memperjuangkan masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan pemerintah dan memperjuangkan tuntutan atau keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Namun terdapat 17% ragu-ragu dan tidak setuju akan hal tersebut, mereka beranggapan bahwa pemimpin adat hanya berkutik dalam adat saja. karna yang

mereka pahami bahwa tugas masing-masing sudah jelas dan selama menjabat tidak ikut campur antara satu dengan yang lainnya. Pernyataan yang muncul dari beberapa informan tersebut berasal dari banjar pande dan bukit kangin, banjar pande merupakan kumpulan masyarakat yang melanggar adat yang kemudian dikelompokkan dalam satu banjar. Sedangkan bukit kangin adalah masyarakat pendatang yang bekerja untuk mengelola kekayaan desa tenganan, sehingga dengan faktor tersebut mereka ragu-ragu dan tidak setuju jika pemerintah adat selalu mendorong pemerintah agar bertindak secara tegas, karena sampai saat tidak ada perdes (peraturan desa) yang di buat oleh pemerintah formal untuk dijadikan sebagai peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat tenganan selain peraturan yang telah ditetapkan dalam awig-awig.

H. Tahap Formulasi dan Adopsi Kebijakan
 Proses formulasi dan adopsi kebijakan



Sumber : Kuesioner no 32- 35 pada indikator keempat dan kelima Variable X.

Segala permasalahan yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para perumus atau pembuat kebijakan. Permasalahan yang ada di definisikan dan dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative yang ada dan biasanya alternative tersebut muncul dari anggota perumus kebijakan.

Hasil penelitian dalam grafik di atas menunjukkan bahwa 94,12% kebijakan yang dibuat atas dasar nilai-nilai kebijakan yaitu meskipun di desa tanganan hidup dengan mitologi kebijakan yang dibuat atas dasar nilai-nilai kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya desa tanganan. Namun 7.14% ragu-ragu dan tidak setuju karena menurut hemat masrakat selain merujuk kepada nilai-nilai

kebijakan juga di kolaborasikan dengan nilai-nilai budaya yang menurut mereka salah satunya tidak bisa di pisahkan ketika dijadikan sebagai rujukan untuk merumuskan sebuah kebijakan pemerintah. Dalam pembuatan kebijakan tersebut masyarakat menyetujui akan pendapat yang selalu diberika oleh pemimpin adat untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pada saat formulasi dan sebelum dilaksanakan adopsi kebijakan sejumlah 94.12% dan hal tersebut didukung oleh pemerintah desa sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh pemimpin adat dalam mensejahterakan masyarakat dengan prosentase 76.19% Setuju dan 23.8% Sangat Setuju.

I. Hubungan Signifikansi Peran Pemimpin Adat terhadap Proses

Perumusan Kebijakan di Desa

Seperti kita tahu bahwa pemimpin informal juga mempunyai peran yang sangat penting dalam politik pemerintahan di desa. Termasuk di desa tenganan pemimpin informal atau yang biasa di kenal dengan pemimpin adat (karma desa) juga mempunyai peranan yang sangat penting dan bermanfaat bagi pemerintah formal terutama masyarakat terutama dalam pembinaan terhadap masyarakat. Desa tenganan menganut sistem dualisme kepemimpinan, kepemimpinan informal (pemimpin adat) dan pemimpin formal (pemerintah desa). Keduanya saling berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk ketika melaksanakan program pemerintah, pemimpin informal selalu berada di dalamnya. Sejatinya pemimpin formal menjalankan peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan atau dengan kata lain menjalankan kepemimpinan secara birokratis (memimpin berdasarkan aturan) dalam lingkup kepemimpinan yang luas, pemimpin formal dapat berperan

multifungsi sebagai pemegang kendali (komando) dalam pemerintahan, sebagai Pembina (sifat membangun ke arah perbaikan) dan sebagai teman untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah).

Dalam analisis peranan pemimpin adat dalam politik pemerintahan penulis menggunakan pendekatan model sistem yang dikembangkan ilmuwan politik David Easton tentang konseptualisasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat ataupun pemerintahan yang secara implisit ataupun eksplisit telah banyak digunakan oleh para sarjana untuk menganalisis mengenai sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat adanya kebijakan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut di desa tenganan juga terdapat proses politik dalam pengambilan keputusan yang di sebabkan oleh beberapa faktor yang berupa tuntutan-tuntutan ataupun dukungan-dukungan dari masyarakat luas ataupun kepentingan pribadi maupun kelompok. Adapun secara rincinya akan dijelaskan melalui bagan berikut ini:

Interaksi Antar Elemen-elemen dalam Proses Politik di Pemerintahan Desa



Merujuk pada pendekatan model sistem yang dikembangkan oleh David Easton yang merupakan model diskriptif karena lebih berusaha menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Di desa tenganan pemimpin informal (pemimpin adat/ krama desa) juga melaksanakan politik dalam proses perumusan kebijakan hingga pada penetapan kebijakan. Karena keberadaannya pemimpin adat di desa tenganan sangat di hormati oleh masyarakat dan juga pemimpin adat di tenganan yang merupakan penguasa wilayah, maka ketika ada perencanaan pembangunan ataupun pembahasan-pembahasan yang masih berkaitan dengan desa tenganan, krama desa adat/ tokoh informal ini selalu diikuti sertakan didalamnya. Alasannya adalah karena para krama desa tersebut dalam politik pemerintahan selain karena penguasa wilayah yang telah diwariskan oleh nenek moyang juga faktor ketaatan terhadap peraturan desa adat atau yang disebut dengan awig-awig masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat termasuk oleh para aparatur pemerintah desa tenganan.

Pemerintah formal dalam hal ini adalah pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa tentu sangat paham akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan yang urgen kemanfaatannya untuk masyarakat luas dan demi keberlangsungan hidup rakyatnya. Oleh karena itu sesuai dengan fungsi dan kewajiban aparat pemerintah desa sudah selayaknya mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai pelayan masyarakat dan mengimplementasi peraturan pemerintah/ kebijakan publik, pemerintah desa tetap

harus berkoordinasi dengan penguasa wilayah tenganan atau krama desa adat tenganan pegringsingan. Dalam koordinasi antara pemimpin formal (pemerintah desa) dengan pemimpin informal (Pemimpin adat) akan terjadi pembahasan secara panjang lebar dan bahkan saling tarik ulur pendapat dalam setiap pembahasan. Pada umumnya pemimpin formal dan informal tersebut saling bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan dan tujuannya sama yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun didalam pembahasannya ada terselip beberapa pendapat yang di dominasi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Misalnya dalam pembahasan tentang pembangunan sarana air minum dalam setiap banjar untuk memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi air bersih. Sebelum di bangun sarana penyaluran air tersebut yang menjadi program pemerintah formal (pemerintah desa) diadakan semacam rapat di kantor desa yang pesertanya terdiri dari keseluruhan aparatur pemerintah desa dan pemimpin informal (krama desa adat). Dalam rapat tersebut terjadilah yang namanya proses politik dalam pengambilan keputusan yang di sebabkan oleh faktor perbedaan pendapat atau persepsi dari masing- masing individu. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut pemimpin formal sebenarnya harus tegas tanpa pandang bulu, karena yang ia perjuangkan adalah masyarakat Tenganan secara keseluruhan yaitu Banjar Pande, Dauh Tukad, Bukit Kangin, dan Pegringsingan. Secara tidak langsung keseluruhan dusun di desa tenganan tersebut adalah pendukung pemerintah desa untuk memperjuangkan nasibnya. Disamping itu dalam proses

politik para tokoh adat juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan (kepentingan kelompok ataupun individu) yang outputnya bisa menguntungkan dan merugikan dusun yang lain. Seperti pengadaan sarana air bersih yang telah di jelaskan tadi yang ternyata hanya di bangun di 3 banjar yaitu di dusun pegringsingan saja. hal ini menjadi salah satu faktor munculnya kekecewaan dusun yang lain terhadap tokoh adat terutama pada pemerintah formal akibat proses politik yang di lakukan oleh tokoh adat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Sehingga kalau melihat bagan diatas terdapat suatu perpecahan dan saling berebut antara pemerintah formal dan tokoh adat karena hakikatnya banjar pande yang merupakan kelompok buangan dari pegringsingan, namun masih tetap dirangkul oleh pegringsingan agar tidak lepas sepenuhnya. Sedangkan disisi lain pemerintah formal juga tetap menginginkan banjar pande untuk tetap menjadi pendukung pemerintah formal dalam perumusan kebijakan, karena menurut pemerintah formal banjar pande tidak sepenuhnya berpihak terhadap adat karena faktor perbedaan hak dan kewajiban secara adat. Oleh karena itu masyarakat banjar pande masih termasuk dalam adat tenganan pegringsingan dan masih tetap diterima untuk bergabung dalam acara ritual keagamaan yang merupakan kegiatan rutin yang telah terjadwal, akan tetapi banjar pande mendapatkan tugas dari pemerintah adat yaitu harus merawat dan membersihkan sarana peribadatan yang ada di desa tenganan pegringsingan.

Berkaitan dengan hal tersebut bisa disimpulkan bahwa banjar pande yang secara tidak langsung merupakan pihak

merasa dirugikan oleh pemerintah adat, maka secara suara atau dukungan warga pande banyak berpihak terhadap pemerintah formal meskipun dalam pelaksanaannya warga banjar pande tetap mengikuti aturan adat walaupun tidak sepenuhnya. Begitupula dengan masyarakat dauh tukat yang memang tidak termasuk dalam adat pegringsingan lebih banyak bersuara terhadap pemerintah formal karena secara struktural mereka masuk dalam desa tenganan. Sedangkan masyarakat bukit kangin lebih dekat terhadap tenganan pegringsingan karena mereka adalah kelompok penggarap lahan asset tanah adat yang memang di beri kewenangan oleh pemerintah adat untuk mengelola lahan, sehingga masyarakat bukit kangin lebih dekat dengan tokoh adat yang juga termasuk pendukungnya.

Adapun hubungan yang dapat di korelasikan kedalam rumus statistic dalam analisis hubungan peran pemimpin adat (X) terhadap proses perumusan kebijakan di desa (Y) sesuai dengan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah menggunakan Pearson's Correlation untuk membuktikan hipotesis hubungan antar variable.

$$r = \frac{N\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$$r = \frac{42 \times 215573 - (2973)(3031)}{\sqrt{[42 \times 212687 - (2973)^2][42 \times 220335 - (3031)^2]}}$$

$$r = \frac{42903}{79595.6005379694}$$

$$r = 0.539012$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan telah terjadi hubungan yang sangat kuat dan dapat diandalkan dengan kekuatan hubungan yang sangat tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara peran pemimpin adat (X) terhadap proses perumusan kebijakan di desa (Y) bermakna signifikan dan bukan sekedar kebetulan. Maka dari hasil tersebut di atas akan diuji dengan pengujian signifikansi koefisien korelasi sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0.539 \times 6.324555}{\sqrt{2.408}}$$

$$t = \frac{3.408636}{1.551773}$$

$$t = 2.196607$$

Harga t diatas akan dibandingkan dengan harga t table untuk menentukan tingkat signifikansi uji kedua pihak dan derajat kebebasan (n-2). Jika harga t hitung > dari t table maka Ho di tolak (berarti ada hubungan yang signifikan).

Sesuai dengan hasil t observasi di atas yaitu t observasi > t table (3,6114 > 2.19667). Dan dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan ada pengaruh yang signifikan antara peran pemimpin adat terhadap proses perumusan kebijakan di desa.

KESIMPULAN

Desa tenganan merupakan desa yang menerapkan sistem dualisme kepemimpinan di Pemerintahan Desa yaitu pemimpin formal (kepala desa perbekel/ dinas) dan pemimpin informal (pemimpin adat). Dalam menjalankan pemerintahan desa, pemerintah desa adat dan pemerintah desa dinas selalu berjalan berdampingan yaitu selalu ada koordinasi dalam setiap urusan yang berkaitan dengan pemerintah desa. Namun terdapat tugas dan kewajiban yang menjadi urusan masing-masing yaitu yang berkaitan dengan urusan administrasi desa adalah kewenangan pemerintah desa untuk melaksanakannya dan pemimpin adat tidak dapat ikut andil, dan apabila pemerintah adat melaksanakan ritual upacara yang telah terjadwal maka pemerintah desa tidak berhak menolak atau menghalangi pelaksanaan tersebut karena pemimpin pemerintah adat adalah penguasa wilayah tenganan. Namun dalam Pemerintahan tersebut terdapat Peran Pemimpin Adat yang sangat berpengaruh terutama dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Adapun peran pemimpin adat tersebut yaitu melaksanakan fungsi artikulator, komunikator, motivator dan sebagai pihak yang mempengaruhi pembuatan keputusan.

Fungsi artikulasi yang dilakukan oleh pemerintah adat mempunyai pengakuan yang sangat tinggi dari masyarakat dan pemerintah desa, karena dalam menjalankan fungsi artikulasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang berupa tuntutan karena faktor ketidakpuasan terhadap kebijakan atau sarana prasaran yang tidak lengkap atau dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya

yang harus dipelihara hingga akhir hayat demi menjaga eksistensi desa. Begitu pula dengan peran sebagai komunikator dan motivator juga mempunyai pengakuan yang tinggi dari masyarakat dalam membina warga secara formal maupun informal ataupun sebagai komunikator dalam menyelesaikan permasalahan agar masalah yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi. 2010. *Sosiologi Klasik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Donalt, Jetter. 2005. *Peran pemimpin adat dalam perubahan struktur desa*. Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Islami, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga
- Kriyanto, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta; Kencana
- Narbuko, Cholid, 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Posolong, harboni. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta Media Presindo
- Rivai, Veithzal, dkk. 2011. *Kepemimpinan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siegel, Sidney. 1985. *Statistik Nonparametrik*. Jakarta; Gramedia
- Ritzer, George dkk. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: PrenadaMediaGroup
- Rztompka, Piotr. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Media Pressindo
- Wirartha, Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Andi Offset
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.